



**RENCANA KERJA
(RENJA)
DINAS KEPENDUDUKAN
DAN
PENCATATAN SIPIL**

**DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
KABUPATEN KEPAHIANG TAHUN 2023**

TAHUN 2023

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pembangunan di bidang administrasi kependudukan bertujuan untuk membangun kualitas data base kependudukan guna menjamin legalitas dokumen kependudukan yang meliputi Kartu Keluarga (KK), Kartu Tanda Penduduk Elektronik (KTP-el), Akta-Akta Pencatatan Sipil maupun surat keterangan kependudukan lainnya. Data base kependudukan yang berkualitas dijadikan sebagai dasar dalam perumusan berbagai kebijakan dan program pembangunan sehingga kegiatannya lebih tepat sasaran dan mampu menjembatani pemenuhan prioritas kebutuhan riil masyarakat.

Rencana Kerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kepahiang Tahun 2023 ini selaras dengan isu-isu strategis yang berkembang di masyarakat serta berdasar Amanat Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan antara lain :

- Kewenangan pencetakan KTP elektronik mulai tahun 2015 dilimpahkan ke Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kepahiang.
- Pelayanan Administrasi Kependudukan semula yang diwajibkan aktif penduduk sebagai pemohon, diubah yang aktif adalah pemerintah melalui petugas Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kepahiang dengan pola stelsel aktif atau pelayanan keliling.
- Kegiatan pencetakan dokumen kependudukan tidak dipungut biaya / gratis.

Sebagai sebuah dokumen resmi PD Renja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kepahiang mempunyai kedudukan yang strategis yaitu menjembatani antara perencanaan pada perangkat daerah (PD) sebagai implementasi pelaksanaan Renstra PD yang bersinergi dan menjadi satu kesatuan untuk mendukung pencapaian visi dan misi daerah / Bupati Kabupaten Kepahiang

Rencana kerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil ini disusun secara terpadu, aspiratif, partisipatif dan demokratis dengan berpedoman pada Permendagri Nomor 69 Tahun 2012 tentang Standart Pelayanan Minimal (SPM) yang mengamanatkan bahwa pelayanan kepada publik yang dilaksanakan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil antara lain meliputi : Prosentase keluarga yang memiliki Kartu Keluarga (KK), Prosentase penduduk yang memiliki Kartu Tanda Penduduk Elektronik (KTP el), Prosentase penduduk yang memiliki Akta Kelahiran, dan Prosentase penduduk yang memiliki Akta Kematian.

Renja PD ini digunakan sebagai dasar untuk penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA) PD dan untuk penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Kepahiang juga sebagai dasar pengusulan program dan kegiatan yang akan dibiayai oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Propinsi dan APBN.

Selanjutnya agar berbagai program dan kegiatan yang akan dilaksanakan pada tahun anggaran berjalan dapat berhasil dengan baik maka perlu disusun perencanaan yang baik dan matang dengan mempertimbangkan keadaan yang ada serta memprediksi kondisi yang akan terjadi dengan berbagai dukungan dan potensi yang dimiliki serta hambatan –hambatan yang mungkin timbul.

1.2 Landasan Hukum

Sebagai Landasan hukum dalam penyusunan Renja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kepahiang Tahun 2023 ini mengacu pada :

1. Undang – Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) ;
2. Undang – Undang Nomor 01 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355) ;
3. Undang – Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389) ;
4. Undang – Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400) ;
5. Undang – Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
6. Undang - Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 No. 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No. 4438) ;
7. Undang – Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan ;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 No. 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578) ;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 03 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Masyarakat.

10. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 08 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2007 tentang Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah ;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 69 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Permendagri Nomor 62 Tahun 2008 tentang Standart Pelayanan Minimal Bidang Pemerintahan Dalam Negeri di Kabupaten/ Kota ;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 109 Tahun 2019 tentang Formulir dan Buku Yang Digunakan Dalam Administrasi Kependudukan;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana pembangunan Jangka Menengah daerah, serta tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan rencana kerja Pemerintah Daerah;
18. Peraturan Pemerintahan Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah antar Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota;
19. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Organisasi Perangkat Daerah;
20. Peraturan Daerah Kabupaten Kepahiang Nomor : 13 Tahun 2016 tentang Susunan, Kedudukan dan Tugas Pokok Organisasi Pemerintah Kabupaten Kepahiang;
21. Peraturan Bupati Kepahiang Nomor 25 Tahun 2016 tentang Penjabaran Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kepahiang

1.3 Maksud dan Tujuan

1.3.1 Maksud

Rencana Kerja (RENJA) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kepahiang tahun 2023 dimaksudkan untuk menetapkan dokumen perencanaan yang memuat program dan kegiatan Pembangunan Daerah menjadi tolak ukur penilaian keberhasilan kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kepahiang selama kurun waktu 2023.

1.3.2 Tujuan

Penyusunan Rencana Kerja (RENJA) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kepahiang tahun 2023 dengan tujuan untuk dapat dijadikan sebagai pedoman pelaksanaan kegiatan pembangunan di bidang Kependudukan dan Pencatatan Sipil 1 (satu) tahun kedepan agar terarah, efektif, efisien, terpadu dan terukur dalam rangka

mewujudkan visi, misi, tujuan, sasaran dan program pembangunan yang telah ditetapkan antara lain :

1. Mewujudkan kualitas pelayanan prima, akurat dan tepat waktu untuk meningkatkan volume kepemilikan dokumen kependudukan.
2. Mewujudkan partisipasi masyarakat dengan membangun penguatan pemahaman masyarakat akan hak dan kewajiban serta pentingnya kepemilikan dokumen kependudukan.
3. Mewujudkan sistem administrasi kependudukan yang baik dan bertanggung jawab.

1.4 Sistematika Penulisan

Sistematika Penulisan Rencana Kerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kepahiang tahun 2023 adalah sebagai berikut :

BAB I : PENDAHULUAN

Pada bagian ini dijelaskan mengenai gambaran umum penyusunan rancangan Renja Perangkat Daerah agar substansi pada bab-bab berikutnya dapat dipahami dengan baik. 1.1 Latar Belakang

Latar Belakang Mengemukakan pengertian ringkas tentang Renja Perangkat Daerah, proses penyusunan Renja Perangkat Daerah, keterkaitan antara Renja Perangkat Daerah dengan dokumen RKPD, Renstra Perangkat Daerah dengan Renja K/L dan Renja provinsi / Kabupaten / kota, serta tindaklanjutnya dengan proses penyusunan RAPBD.

1.2 Landasan Hukum

Landasan Hukum Memuat penjelasan tentang undang-undang, peraturan pemerintah, peraturan daerah, dan ketentuan peraturan lainnya yang mengatur tentang SOTK, kewenangan Perangkat Daerah, serta pedoman

yang dijadikan acuan dalam penyusunan perencanaan dan penganggaran Perangkat Daerah.

1.3 Maksud dan Tujuan

Maksud dan Tujuan Memuat penjelasan tentang maksud dan tujuan dari penyusunan Renja Perangkat Daerah

1.4 Sistematika Penulisan

Sistematika Penulisan Menguraikan pokok bahasan dalam penulisan Renja Perangkat Daerah, serta susunan garis besar isi dokumen.

BAB II : EVALUASI PELAKSANAAN RENJA PD TAHUN LALU

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah

Bab ini memuat kajian (review) terhadap hasil evaluasi pelaksanaan Renja Perangkat Daerah tahun lalu (tahun n-2) dan perkiraan capaian tahun berjalan (tahun n-1), mengacu pada APBD tahun berjalan yang seharusnya pada waktu penyusunan Renja Perangkat Daerah sudah disahkan. Selanjutnya dikaitkan

dengan pencapaian target Renstra Perangkat Daerah berdasarkan realisasi program dan kegiatan pelaksanaan Renja Perangkat Daerah tahun-tahun sebelumnya.

Review hasil evaluasi pelaksanaan Renja Perangkat Daerah tahun lalu, dan realisasi Renstra Perangkat Daerah mengacu pada hasil laporan kinerja tahunan Perangkat Daerah dan / atau realisasi APBD untuk Perangkat Daerah yang bersangkutan

Pokok-pokok materi yang disajikan dalam bab ini, antara lain:

1. Realisasi program / kegiatan yang tidak memenuhi target kinerja hasil/ keluaran yang direncanakan;
2. Realisasi program / kegiatan yang telah memenuhi target kinerja hasil/ keluaran yang direncanakan;
3. Realisasi program / kegiatan yang melebihi target kinerja hasil / keluaran yang direncanakan;
4. Faktor-faktor penyebab tidak tercapainya, terpenuhinya atau melebihi target kinerja program / kegiatan;
5. Implikasi yang timbul terhadap target capaian program Renstra Perangkat Daerah; dan
6. Kebijakan / tindakan perencanaan dan penganggaran yang perlu diambil untuk mengatasi factor - faktor penyebab tersebut.

Tabel yang perlu disajikan yang disesuaikan dengan Perangkat Daerah masing-masing, dengan format sesuai halaman terlampir

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Berisikan kajian terhadap capaian kinerja pelayanan Perangkat Daerah berdasarkan indikator kinerja yang sudah ditentukan dalam NSPK dan SPM, maupun terhadap IKK sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008.

Jenis indikator yang dikaji, disesuaikan dengan tugas dan fungsi masing-masing Perangkat Daerah, serta ketentuan peraturan perundang-undangan yang terkait dengan kinerja pelayanan. Jika Perangkat Daerah yang bersangkutan belum mempunyai tolok ukur dan indikator kinerja yang akan diuji, maka setiap Perangkat Daerah perlu terlebih dahulu menjelaskan apa dan bagaimana cara menentukan tolok ukur kinerja dan indikator kinerja pelayanan masing-masing sesuai tugas pokok dan fungsi, serta norma dan standar pelayanan Perangkat Daerah yang bersangkutan. Pada pembahasan sub bab ini perlu disajikan table analisis pencapaian kinerja pelayanan Perangkat Daerah, yang disesuaikan menurut Perangkat Daerah masing-masing, dengan format sebagaimana terlampir

2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah Berisikan uraian mengenai:

1. Sejauh mana tingkat kinerja pelayanan Perangkat Daerah dan hal kritis yang terkait dengan pelayanan Perangkat Daerah; Khusus provinsi, uraikan mengenai koordinasi dan sinergi program antara Perangkat Daerah provinsi dengan Perangkat Daerah kabupaten / kota serta dengan kementerian dan lembaga di tingkat pusat dalam rangka pencapaian kinerja pembangunan;
2. Permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam menyelenggarakan tugas dan fungsi Perangkat Daerah;
3. Dampaknya terhadap pencapaian visi dan misi kepala daerah, terhadap capaian program nasional/internasional, seperti NSPK, SPM dan SDGs (Sustainable Development Goals);
4. Tantangan dan peluang dalam meningkatkan pelayanan Perangkat Daerah; dan
5. Formulasi isu-isu penting berupa rekomendasi dan catatan yang strategis untuk ditindaklanjuti dalam perumusan program dan kegiatan prioritas tahun yang direncanakan.

2.4 Review terhadap Rancangan Awal RKPD

Berisikan uraian mengenai:

1. Proses yang dilakukan yaitu membandingkan antara rancangan awal RKPD dengan hasil analisis kebutuhan;
2. Penjelasan mengenai alasan proses tersebut dilakukan;
3. Penjelasan temuan - temuan setelah proses tersebut dan catatan penting terhadap perbedaan dengan rancangan awal RKPD, misalnya: terdapat rumusan program dan kegiatan baru yang tidak terdapat di rancangan awal RKPD, atau program dan kegiatan cocok namun besarnya berbeda; sebagaimana halaman lampiran.

2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Dalam bagian ini diuraikan hasil kajian terhadap program/kegiatan yang diusulkan para pemangku kepentingan, baik dari kelompok masyarakat terkait langsung dengan pelayanan provinsi, LSM, asosiasi-asosiasi, perguruan tinggi maupun dari Perangkat Daerah kabupaten/kota yang langsung ditujukan kepada Perangkat Daerah Provinsi maupun berdasarkan hasil pengumpulan informasi Perangkat Daerah provinsi dari penelitian lapangan dan pengamatan pelaksanaan musrenbang kabupaten/kota (bila sudah dilakukan).

Deskripsi yang perlu disajikan dalam subbab ini, antara lain:

1. Penjelasan tentang proses bagaimana usulan program/kegiatan usulan pemangku kepentingan tersebut diperoleh ;
2. Penjelasan kesesuaian usulan tersebut dikaitkan dengan isu-isu penting penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah;

BAB III: TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional

Telaahan terhadap kebijakan nasional dan sebagaimana dimaksud, yaitu penelaahan yang menyangkut arah kebijakan dan prioritas pembangunan nasional dan yang terkait dengan tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah.

3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah

Perumusan tujuan dan sasaran didasarkan atas rumusan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Perangkat Daerah yang dikaitkan dengan sasaran target kinerja Renstra Perangkat Daerah.

3.3 Program dan Kegiatan Berisikan penjelasan mengenai:

- a. Faktor-faktor yang menjadi bahan pertimbangan terhadap rumusan program dan kegiatan. Misal:
Pencapaian visi dan misi kepala daerah,

- a. Pencapaian SDGs
 - b. Pengentasan kemiskinan,
 - c. Pencapaian NSPK dan SPM,
 - d. Pendayagunaan potensi ekonomi daerah,
 - e. Pengembangan daerah terisolir,
 - f. Dsb.
- b. Uraian garis besar mengenai rekapitulasi program dan kegiatan, antara lain meliputi:
 - a. Jumlah program dan jumlah kegiatan.
 - b. Sifat penyebaran lokasi program dan kegiatan (apa saja yang tersebar ke berbagai kawasan dan apa saja yang terfokus pada kawasan atau kelompok masyarakat tertentu).
 - c. Total kebutuhan dana/pagu indikatif yang dirinci menurut sumber pendanaannya.
 - c. Penjelasan jika rumusan program dan kegiatan tidak sesuai dengan rancangan awal RKPD, baik jenis program/kegiatan, pagu indikatif, maupun kombinasi keduanya.
 - d. Tabel rencana program dan kegiatan berdasarkan hasil pengerjaan Sebagaimana terdapat dalam halaman lampiran

BAB IV : RENCANA KERJA DAN PENDANAAN

Rencana Kerja dan Pendanaan Perangkat Daerah berisi tentang Rencana Kerja Pendanaan Organisasi Perangkat Daerah sebagaimana pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten.

BAB V : PENUTUP

Berisikan uraian penutup, berupa:

- a. Catatan penting yang perlu mendapat perhatian, baik dalam rangka pelaksanaannya maupun seandainya ketersediaan anggaran tidak sesuai dengan kebutuhan.
- b. Kaidah-kaidah pelaksanaan.
- c. Rencana tindak lanjut.

BAB II

EVALUASI PELAKSANAAN RENJA PD TAHUN LALU

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja PD Tahun lalu dan Capaian Renstra PD

Rencana strategis Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kepahiang tahun 2021-2026 dikaitkan dengan pencapaian Renstra berdasarkan realisasi program dan kegiatan adalah sebagai berikut :

1. Penyusunan Renja Tahun Anggaran 2023 belum mengakomodasi rencana strategis nasional sehingga ada kegiatan yang belum dianggarkan tahun ini yaitu sarana dan prasarana pendukung kearsipan administrasi kependudukan yang bersifat dinamis dan berlaku sepanjang masa baik dalam bentuk dokumen material maupun digital.
2. Kegiatan sosialisasi administrasi kependudukan mulai dari tingkat RT, Desa, Kecamatan dan Kabupaten guna mendukung pelayanan yang prima masih sangat minim.
3. Pengurusan dan penerbitan dokumen kependudukan tidak dipungut biaya dan pencetakan dokumen kependudukan untuk kegiatan pelayanan keliling tidak bisa langsung cetak di tempat.
4. Permohonan pengurusan Administrasi kependudukan dapat dilakukan secara Online.

Adapun kendala-kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan program dan kegiatan tahun anggaran 2023, antara lain :

- a. Masih rendahnya tingkat pemahaman dan kesadaran masyarakat tentang manfaat dan kegunaan administrasi kependudukan,
- b. Kurangnya tenaga pelayanan administrasi kependudukan yang memiliki kompetensi di bidang teknologi informatika
- c. Kurangnya sarana dan prasarana sebagai pendukung program proses penerbitan administrasi kependudukan,

ANALISIS CAPAIAN KINERJA ANGGARAN

Dalam rangka pencapaian sasaran meningkatnya kualitas layanan administrasi kependudukan, pada tahun anggaran 2021 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kepahiang mengelola anggaran belanja langsung dan tidak langsung sebesar Rp. 3.883.426.016,17 yang terdiri dari Belanja Tidak Langsung Rp. 2.369.738.088,00 dan Belanja Langsung Rp. 1.513.687.928,17 yang bersumber dari dana DAU dan DAK.

Adapun rincian belanja langsung tersebut adalah :

- Belanja Langsung dari DAU sebesar Rp. 605.610.928,17
- Belanja Langsung dari DAK sebesar Rp. 908.077.000,00

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kepahiang untuk tahun anggaran 2022 tidak lagi mendapatkan Dana Alokasi Khusus (DAK) Dana Pelayanan Administrasi

Kependudukan tidak dianggarkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Tahun Anggaran 2022, Untuk menjaga keberlangsungan pelayanan administrasi kependudukan dengan memberikan pelayanan tersebut, untuk mewujudkan pelayanan yang membahagiakan masyarakat melalui TAPD dapat mengalokasikan Anggaran melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang memadai untuk menjamin berlangsungnya pelayanan administrasi kependudukan di Kabupaten Kepahiang di tahun 2023

Secara rinci Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Rencana Kerja dan Pencapaian Renstra Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kepahiang tahun 2021 dapat dilihat pada tabel berikut

Tabel 2.1
Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja SKPD dan Pencapaian Renstra SKPD s/d Tahun 2021
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Kepahiang

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra SKPD) Tahun 2021	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2)				Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra SKPD s/d tahun berjalan		Catatan
				Target Renja SKPD (tahun n-2)	Realisasi Renja SKPD (tahun n-2)	Tingkat Realisasi (%)	Target Program/ Kegiatan SKPD tahun berjalan (tahun n-1) (tahun 2021)	Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun 2022)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2	Urusan Pemerintah Wajib yang tidak berkaitan Dengan Pelayanan Dasar									
2.12	Urusan Pemerintah Bidang Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil									
2.12.01	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil									
2.12.01	Prog 1 Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Pencapaian Pelayanan Administrasi Kantor	100 %							
2.12.01.2.01	Keg1.Perencanaan, penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah									
2.12.01.2.01.06	Sub Keg 1.1 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	- Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	15 OB			100 %	15 OB	16 OB	100 %	
		- Tersedianya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD								
2.12.01.2.02	Keg 1 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah									
2.12.01.2.02.01	Sub Keg 2.1 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	- Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	27 OB	27 OB	27 OB	100 %	27 OB	27 OB	100 %	
		- Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN								
2.12.01.2.06	Keg 2. Administrasi Umum Perangkat Daerah									
2.12.01.2.06.01	Sub Keg 2.1 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	- Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	3 rekening	3 rekening	3 rekening	100 %	3 rekening	4 rekening	100 %	

		- Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor								
2.12.01.2.06.04	Sub Keg 2.2 Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	70 jenis ATK, 10 jenis alat kebrsihan dan 500 kotak snack/500 nasi kotak	70 jenis ATK, 10 jenis alat kebrsihan dan 500 kotak snack/500 nasi kotak	70 jenis ATK, 10 jenis alat kebrsihan dan 500 kotak snack/500 nasi kotak	100 %	70 jenis ATK, 10 jenis alat kebrsihan dan 500 kotak snack/500 nasi kotak	70 jenis ATK, 15 jenis alat kebrsihan dan 500 kotak snack/500 nasi kotak	100 %	
		- Tersedianya Bahan Logistik Kantor								
2.12.01.2.06.05	Sub Keg 2.3 Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	15 Dokumen	15 Dokumen	15 Dokumen	100 %	15 Dokumen	15 Dokumen	100 %	
		- Tersedianya Barang Cetak dan Penggandaan								
2.12.01.2.06.06	Sub Keg 2.4 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	8 media elektronik/cetak	8 media elektronik/cetak	8 media elektronik/cetak	100 %	8 media elektronik/cetak	8 media elektronik/cetak	100 %	
		- Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan								
2.12.01.2.06.09	Sub Keg 2.5 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	34 Laporan	34 Laporan	34 Laporan	100 %	34 Laporan	34 Laporan	100 %	
		- Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD								
2.12.01.2.08	Keg 3 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah									
2.12.01.2.08.01	Sub Keg 3.1 Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	250 surat	15 surat	15 surat	100 %	250 surat	250 surat	100 %	
		- Terlaksananya Penyediaan Jasa Surat Menyurat								
2.12.01.2.08.02	Sub. 3.2 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 rekening	1 rekening	1 rekening	100 %	1 rekening	1 rekening	100 %	
		- Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik								
2.12.01.2.09	Keg 4. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah									
2.12.01.2.09.02	Sub Keg 4.1 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	2 kendaraan roda dua dan 6 kendaraan roda dua	2 kendaraan roda dua dan 6 kendaraan roda dua	2 kendaraan roda dua dan 6 kendaraan roda dua	100 %	2 kendaraan roda dua dan 6 kendaraan roda dua	2 kendaraan roda dua dan 6 kendaraan roda dua	100 %	
		- Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan								
2.12.04	Prog 2 Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan									
2.12.04.2.01	Sub Keg 1 Pengumpulan Data Kependudukan dan Pemanfaatan dan Penyajian Database Kependudukan									

2.12.04.2.01.03	Keg 1.1 Inventarisasi Data untuk Kepentingan Pembangunan Daerah	- Jumlah Laporan Hasil Inventarisasi Data untuk Kepentingan Pembangunan Daerah	3 Aplikasi, 2 Unit Laptop, 1 Unit Scanner, 1 Unit Projector	3 Aplikasi, 2 Unit Laptop, 1 Unit Scanner, 1 Unit Projector	3 Aplikasi, 2 Unit Laptop, 1 Unit Scanner, 1 Unit Projector	100 %	3 Aplikasi, 2 Unit Laptop, 1 Unit Scanner, 1 Unit Projector	-	-	
		- Terlaksananya Inventarisasi Data untuk Kepentingan Pembangunan Daerah								
2.12.04.2.03.	Sub Keg 2 Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan									
2.12.04.2.03.03	Keg 2.1 Fasilitasi Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	- Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Jumlah ribbon, cleaning kit, film printer, blangko kia, cetak leaflet, cetak formulir pendaftaran, sosialisasi, pelayanan jemput bola ke kecamatan, kelurahan dan desa	10 jenis	10 jenis	10 jenis	Jumlah ribbon, cleaning kit, film printer, blangko kia, cetak leaflet, cetak formulir pendaftaran, sosialisasi, pelayanan jemput bola ke kecamatan, kelurahan dan desa	-	-	Di tahun 2022 Dana Alokasi Khusus (DAK) tidak dianggarkan di APBN
		- Terfasilitasinya Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan								
2.12.04.2.03.06	Keg 2.2 Kerja Sama dengan Organisasi Masyarakat dan Perguruan Tinggi	- Jumlah Dokumen Kerja Sama dengan Organisasi Masyarakat dan Perguruan Tinggi						Dokumen	100 %	IKM
		- Terlaksananya Kerja Sama dengan Organisasi Masyarakat dan Perguruan Tinggi								
2.12.04.2.04	Sub Keg 3 Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan									
2.12.04.2.04.02	Keg 3.1 Supervisi Bersama dengan Kantor Kementerian yang Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di Bidang Agama Kabupaten/Kota dan Pengadilan Agama mengenai Pelaporan Pencatatan Nikah, Talak, Cerai, dan Rujuk bagi Penduduk yang Beragama Islam dalam rangka Pembangunan Basis Data Kependudukan	- Jumlah Dokumen Supervisi Bersama dengan Kantor Kementerian yang Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di Bidang Agama Kabupaten/Kota dan Pengadilan Agama Mengenai Pelaporan Pencatatan Nikah, Talak, Cerai, dan Rujuk bagi Penduduk yang Beragama Islam dalam rangka Pembangunan Basis Data Kependudukan						Dokumen	100 %	Aplikasi
		- Terlaksananya Supervisi Bersama dengan Kantor Kementerian yang Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di Bidang Agama Kabupaten/Kota dan Pengadilan Agama Mengenai Pelaporan Pencatatan Nikah, Talak, Cerai, dan Rujuk bagi Penduduk yang Beragama Islam dalam rangka Pembangunan Basis Data Kependudukan								

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan PD

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kepahiang sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya melaksanakan pelayanan, dengan indikator kinerja sebagai berikut :

2.2.1 IKM pelayanan administrasi kependudukan

Secara umum kualitas pelayanan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kepahiang sudah baik yaitu telah mencapai target IKM tahun 2020 yaitu mencapai 77,93 sehingga di tahun 2022 target nilai IKM sebesar 85 dapat tercapai. Hal ini diperoleh karena adanya perubahan metode pelayanan yang semula stelsel pasif menjadi stelsel aktif, Pelayanan keliling jemput bola ke desa-desa, sekolah dan tempat lain, adanya pemangkasan persyaratan dokumen kependudukan serta pelayanan sehari selesai dan pelayanan dokumen administrasi kependudukan yang dilaksanakan secara on line.

Adapun unsur pelayanan yang dianggap paling memuaskan oleh masyarakat adalah unsur biaya/tarif, kompetensi pelaksana dan pelaku pelaksana, sedangkan unsur yang dianggap kurang memuaskan adalah kurangnya sarana dan prasarana yang dimiliki Dinas serta penanganan pengaduan masyarakat yang perlu ditingkatkan .

Diharapkan diperlukan upaya untuk mempertahankan kualitas pelayanan dengan melakukan upaya-upaya peningkatan kualitas pelayanan secara konsisten dan terus menerus terutama perilaku pelaksana dengan melaksanakan Bimtek Service Excellence bagi petugas Front Office / Front Liner, Penyederhanaan Standart Operator Pelayanan (SOP), serta mendekatkan pelayanan dokumen kependudukan dengan cara melaksanakan kegiatan pelayanan dan penerbitan di Kecamatan

2.2.2 Prosentase data yang akurat

Dengan terwujudnya database kependudukan yang valid atau akurat dapat digunakan sebagai data / masukan / bahan untuk pembangunan.

Database kependudukan juga digunakan sebagai dasar dalam pemberian NIK kepada setiap penduduk, tertib administrasi pelayanan publik, pelaksanaan pemilu, dan Pilkada serta dalam jangka panjang digunakan sebagai data dasar dalam rangka program pembangunan pemerintah.

Akurasi data kependudukan adalah data kependudukan berdasar aplikasi database Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIK) dibandingkan dengan data Konsolidasi bersih (DKB) dengan target untuk tahun anggaran 2021 adalah 98 % sedangkan pencapaian akurasi data kependudukan adalah 89,8 % atau mencapai 89 % dari target 98 %, Tidak tercapainya akurasi data sesuai dengan yang

ditergetkan. Hal ini karena banyak penduduk yang tidak melaporkan apabila ada bagian dari keluarganya yang meninggal atau ada jiwa dalam keluarga yang pindah ke luar Kabupaten atau ada peristiwa penting dan peristiwa kependudukan lainnya.

2.2.3 Prosentase keluarga yang memiliki Kartu Keluarga (KK)

Indikator ini menggambarkan prosentase jumlah kepala keluarga yang telah memiliki KK (Kartu Keluarga) yang pengukurannya di dasarkan pada jumlah kepala keluarga yang telah memiliki KK dibagi dengan kepala keluarga yang wajib KK. Pada tahun 2021, kepala keluarga yang mempunyai KK di Kabupaten Kepahiang sebanyak 74.530

2.2.4 Prosentase penduduk yang memiliki Kartu Tanda Penduduk Elektronik (KTP el)

Indikator ini menggambarkan prosentase jumlah penduduk yang telah memiliki KTP el (Kartu Tanda Penduduk elektronik), yang pengukurannya didasarkan pada jumlah penduduk yang telah memiliki KTP el dari seluruh wajib KTPel yang ada. Pada tahun 2021 jumlah penduduk wajib ber-KTP el di Kabupaten Kepahiang sebanyak 113.463 orang dengan jumlah wajib KTP belum rekam 4,735, total wajib KTP sudah rekam 109,961, dengan jumlah KTP yang sudah tercetak sebanyak 120.230 maka prosentase penduduk ber-KTP el sebesar 105,96 %. Apabila dibandingkan dengan target tahun 2021 sebesar 94,51 %.

2.2.5 Prosentase penduduk yang memiliki Akta Kelahiran

Indikator ini menggambarkan prosentase jumlah penduduk yang telah memiliki akta kelahiran yang pengukurannya di dasarkan pada jumlah penduduk lahir yang telah memiliki akta kelahiran dibagi dengan jumlah kelahiran. Pada tahun 2021 penduduk lahir yang telah memiliki akta kelahiran di Kabupaten Kepahiang sebanyak 43,468 orang dengan jumlah kelahiran sebanyak 49,138 orang, maka prosentase penduduk yang telah memiliki akta kelahiran sebesar 113,04 %. Apabila dibandingkan dengan target tahun 2021 sebesar 99,21 %

2.2.4 Prosentase penduduk yang memiliki Akta Kematian

Indikator ini menggambarkan prosentase jumlah penduduk yang telah memiliki akta kematian yang pengukurannya di dasarkan pada jumlah penduduk mati yang telah memiliki akta kematian dibagi dengan jumlah kematian. Pada tahun 2021 penduduk mati yang telah memiliki akta kematian di Kabupaten Kepahiang sebanyak 2527 orang dengan jumlah kematian yang dilaporkan sebanyak 2527 orang, maka prosentase penduduk yang telah memiliki akta kematian sebesar 100 %. Apabila dibandingkan dengan target tahun 2021s sebesar 72 %

Tabel 2.2
Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Kabupaten Kepahiang

NO	Indikator	SPM/Standar Nasional	IKK	Target Renstra SKPD				Realisasi Capaian		Proyeksi		Pencatatan Analisis
				2021 (th n-2)	2022 (th n-1)	2023 (th n)	2024 (th n+1)	2021 (th n-2)	2022 (th n-1)	2023 (th n)	2024 (th n+1)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	IKK Tahun 2021 - 2026											
2	IKM Pelayanan Administrasi Kependudukan			-	A (85)	A (88)	A (90)	-	B (84,99)	A (88)	A (90)	
3	Prosentase Data yang Akurat	95 %										
4	Prosentase Keluarga yang memiliki Kartu Keluarga (KK)	100 %	100 %	100	100	100	100	100	100	100	100	
5	Prosentase Penduduk yang memiliki Kartu Tanda Penduduk Elektronik (KTP-el)	99,3 %	100 %	105,96	107	109,5	110,9	105,96	107	109,5	110,9	
6	Persentase Kepemilikan Kartu Identitas Anak (KIA)	40 %	100 %	68,48	73	78,5	81,4	68,48	73	78,5	81,4	
7	Prosentase Penduduk yang memiliki Akte Kelahiran	99 %	100 %	113,04	115	117,2	120	113,04	115	117,2	120	
8	Prosentase Penduduk yang memiliki Akte Kematian	100 %	100 %	100	100	100	100	100	100	100	100	
9	Prosentase Penduduk yang memiliki Akte Pasangan Suami Istri	100 %	100 %	100	100	100	100	100	100	100	100	

2.3 Isu-isu penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

2.3.1 Tingkat Kinerja Pelayanan PD dan Hal Kritis yang terkait dengan pelayanan PD

Berdasarkan hasil evaluasi indikator kinerja pelayanan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kepahiang cukup baik karena dari ke lima indikator kinerja tersebut, telah memenuhi target yang telah ditetapkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kepahiang.

2.3.2 Permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam menyelenggarakan tugas dan fungsi PD

- a. Belum optimalnya pelayanan di pelayanan DUKCAPIL
- b. Dalam rangka integrasi pelayanan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil sehingga tercapai akurasi database, regulasi Pemerintah di bidang penyelenggaraan adminduk (UU Nomor 24 Tahun 2013, PP Nomor 37 Tahun 2007 dan Perpres Nomor 96 Th 2018 serta Permendagri Nomor 7 Tahun 2019) harus dilaksanakan secara keseluruhan, berkesinambungan dan terus - menerus, antara lain melalui: Penyediaan aplikasi untuk setiap jenis pelayanan (pendaftaran penduduk, pencatatan sipil, pengolahan/pemanfaatan data dan informasi) yang terintegrasi ke dalam satu sistem, yaitu SIAK dan Pemutakhiran database (pendaftaran penduduk, pencatatan sipil,
- c. Sarana dan Prasarana seperti alat perekaman KTP-el Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kepahiang masih menggunakan bantuan Ditjen Dukcapil tahun 2014 sehingga perlu pengadaan alat perekaman KTP-el yang baru dan alat-alat penunjang lainnya.
- d. Belum terselesaikannya pembentukan arsip digital untuk seluruh akta-akta Pencatatan Sipil dan berkas Pendaftaran Penduduk Guna meningkatkan pelayanan dan pengelolaan kearsipan yang bersifat dinamis dan berlaku sepanjang masa agar diupayakan segera dibangun gedung arsip kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kepahiang yang representatif.
- e. Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kepahiang tidak memadai lagi untuk gedung pelayanan sehingga perlu di renopasi untuk menunjang pelayanan publik di Kabupaten Kepahiang.

2.3.3 Dampaknya terhadap pencapaian visi dan misi kepala daerah , terhadap capaian program nasional / internasional , seperti SPM dan MDGs (Milenium development Goals)

Pencapaian visi dan misi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kepahiang sebagai penjabaran dari visi misi Kabupaten Kepahiang akan sangat memberikan kontribusi positif terhadap pencapaian visi nasional yaitu “ **Tertib Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil** “

2.3.4 Tantangan dan Peluang dalam meningkatkan pelayanan PD

Tantangan dalam peningkatan pelayanan , antara lain :

1. Masih rendahnya kesadaran masyarakat tentang manfaat dan kegunaan dokumen kependudukan ;
2. Masih rendahnya pengetahuan masyarakat terhadap prosedur dan persyaratan pengurusan administrasi kependudukan.
3. Belum tersedianya gedung kantor yang representatif khususnya untuk pengelolaan kearsipan administrasi kependudukan yang bersifat dinamis dan berlaku sepanjang masa.

Peluang dalam peningkatan pelayanan, antara lain :

1. Komitmen Kepala Daerah yang dikuatkan dan dituangkan dalam surat pernyataan kesanggupan melaksanakan dan bertanggung jawab sukses program KTP elektronik yang ditanda tangani Bupati dan Ketua DPRD.
2. Adanya dukungan perangkat keras dan lunak dari Pemerintah Pusat untuk Program Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK) online.

2.3.5 Formulasi isu-isu penting berupa rekomendasi dan Pencatatan yang strategis prioritas tahun yang direncanakan.

Dari isu-isu penting tersebut di atas dapat kami formulasikan dengan rekomendasi-rekomendasi sebagai berikut :

1. Penerapan Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK) online merupakan reformasi mendasar pengelolaan administrasi kependudukan dan Pencatatan secara modern sesuai dengan standart internasional yang telah disepakati Persatuan Bangsa Bangsa (PBB) harus disukseskan pelaksanaannya.
2. Guna meningkatkan pelayanan dan pengelolaan kearsipan yang bersifat dinamis dan berlaku sepanjang masa agar diupayakan segera dibangun gedung arsip kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kepahiang yang representatif.
3. Dalam rangka mensukseskan program KTP elektronik di Kabupaten Kepahiang tahun 2020 diperlukan dukungan sarana dan prasarana, tambahan petugas yang memiliki kompetensi di bidang informasi tekhnologi (IT) serta kerjasama dengan semua pihak, khususnya aparat tingkat Kecamatan dan Aparat Desa / Kelurahan.

2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD

Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) merupakan dokumen perencanaan pemerintah untuk periode satu tahun dan merupakan penjabaran dari RPJMD yang memuat tiga hal yaitu :

- Rancangan kerangka ekonomi daerah
- Program prioritas pembangunan daerah dan
- Rencana kerja, pendanaan dan prakiraan maju,

Selanjutnya ketiga hal tersebut dipakai sebagai dasar penyusunan KUA-PPAS Rencana Kerja (Renja) OPD Kabupaten Kepahiang berdasarkan OPD Kabupaten Kepahiang yang sifatnya sebagai pendukung dari pelaksanaan Renja OPD se Kabupaten Kepahiang yang melaksanakan program dan kegiatan berlokasi di wilayah Kabupaten Kepahiang.

Untuk membandingkan rancangan awal RKPD dengan hasil analisis kebutuhan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil , disajikan tabel berikut:

Tabel 2.3
Review Terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2023
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kepahiang

Rancangan Awal RKPD						Hasil Analisis Kebutuhan					Pencatatan penting	
Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan / Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Satuan	Pagu Indikatif	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan / Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Satuan	Kebutuhan dana		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
2	Urusan Pemerintah Wajib yang tidak berkaitan Dengan Pelayanan Dasar											
2.12	Urusan Pemerintah Bidang Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil				3.444.315.451,00	Urusan Pemerintah Bidang Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil				3.444.315.451,00		
2.12.01	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil				3.444.315.451,00	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil				3.444.315.451,00		
2.12.01	Prog 1 Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Kepahiang			2.427.315.451,00	Prog 1 Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Kepahiang			2.427.315.451,00		
2.12.01.2.01	Keg1.Perencanaan, penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah					Keg 1. Perencanaan, penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah						
2.12.01.2.01.06	Sub Keg 1.1 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD		- Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Laporan	212.430.000,00	Sub Keg 1.1 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD		- Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Laporan	212.430.000,00		
			- Tersedianya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD					- Tersedianya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				
2.12.01.2.05	Keg 2. Administrasi					Keg 2. Administrasi						

	Kepegawaian Perangkat Daerah					Kepegawaian Perangkat Daerah					
2.12.01.2.05.09	Sub Keg 2.1 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi		- Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Orang	50.000.000,00	Sub Keg 2.1 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi		- Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Orang	50.000.000,00	
			- Terlaksananya Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi					- Terlaksananya Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi			
2.12.01.2.05.11	Sub Keg. 2.2 Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan		- Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Orang	85.000.000,00	Sub Keg. 2.2 Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan		- Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Orang	85.000.000,00	
			- Terlaksananya Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan					- Terlaksananya Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan			
2.12.01.2.06	Keg 3. Administrasi Umum Perangkat Daerah					Keg 3. Administrasi Umum Perangkat Daerah					
2.12.01.2.06.01	Sub Keg 3.1 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor		- Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket	3.500.000,00	Sub Keg 3.1 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor		- Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket	3.500.000,00	
			- Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor					- Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor			
2.12.01.2.06.02	Sub Keg 3.2 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor		- Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	85.000.000,00	Sub Keg 3.2 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor		- Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	85.000.000,00	
			- Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor					- Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor			
2.12.01.2.06.03	Sub Keg 3.3 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga		- Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Paket	5.000.000,00	Sub Keg 3.3 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga		- Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Paket	5.000.000,00	
			- Tersedianya Peralatan Rumah Tangga					- Tersedianya Peralatan Rumah Tangga			
2.12.01.2.06.04	Sub Keg 3.4 Penyediaan Bahan Logistik Kantor		Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Paket	394.200.000,00	Sub Keg 3.4 Penyediaan Bahan Logistik Kantor		Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Paket	394.200.000,00	
			- Tersedianya Bahan Logistik Kantor					- Tersedianya Bahan Logistik Kantor			
2.12.01.2.06.05	Sub Keg 3.5 Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan		- Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	24.000.000,00	Sub Keg 3.5 Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan		- Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	24.000.000,00	
			- Tersedianya Barang Cetak dan Penggandaan					- Tersedianya Barang Cetak dan Penggandaan			
2.12.01.2.06.06	Sub Keg 3.6 Penyediaan		- Jumlah Dokumen Bahan Bacaan	Dokumen	25.000.000,00	Sub Keg 3.6 Penyediaan		- Jumlah Dokumen Bahan Bacaan	Dokumen	25.000.000,00	

	Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan		dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan			Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan		dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan		
			- Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan					- Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan		
2.12.01.2.06.07	Sub Keg 3.7 Penyediaan Bahan/Material		- Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	Paket	15.000.000,00	Sub Keg 3.7 Penyediaan Bahan/Material		- Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	Paket	15.000.000,00
			- Tersedianya Bahan/Material					- Tersedianya Bahan/Material		
2.12.01.2.06.09	Sub Keg 3.8 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		- Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	138.601.051	Sub Keg 3.8 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		- Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	138.601.051
			- Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD					- Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		
2.12.01.2.08	Keg 4. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					Keg 4. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				
2.12.01.2.08.01	Sub Keg 4.1 Penyediaan Jasa Surat Menyurat		- Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Laporan	3.384.400,00	Sub Keg 4.1 Penyediaan Jasa Surat Menyurat		- Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Laporan	3.384.400,00
			- Terlaksananya Penyediaan Jasa Surat Menyurat					- Terlaksananya Penyediaan Jasa Surat Menyurat		
2.12.01.2.08.02	Sub. 4.2 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		- Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	50.000.000,00	Sub. 4.2 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		- Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	50.000.000,00
			- Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik					- Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		
2.12.01.2.07	Keg 5 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah					Keg 5 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah				
2.12.01.2.07.05	Sub Keg 5.1 Pengadaan Mebel		- Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Unit	98.000.000,00	Sub Keg 5.1 Pengadaan Mebel		- Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Unit	98.000.000,00
			- Tersedianya Mebel					- Tersedianya Mebel		
2.12.01.2.07.06	Sub Keg 5.2 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya		- Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Unit	350.000.000,00	Sub Keg 5.2 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya		- Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Unit	350.000.000,00
			- Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya					- Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya		
2.12.01.2.07.09	Sub Keg 5.3 Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya		- Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Unit	350.000.000,00	Sub Keg 5.3 Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya		- Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Unit	350.000.000,00
			- Tersedianya Gedung Kantor					- Tersedianya Gedung Kantor		

			Kantor atau Bangunan Lainnya					atau Bangunan Lainnya			
2.12.01.2.09	Keg 6. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					Keg 6. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					
2.12.01.2.09.01	Sub Keg 6.1 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan		- Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Unit	112.700.000,00	Sub Keg 6.1 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan		- Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Unit	112.700.000,00	
			- Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan					- Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan			
2.12.01.2.09.06	Sub Keg 6.2 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya		- Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Unit	25.500.000,00	Sub Keg 6.2 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya		- Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Unit	25.500.000,00	
			- Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya					- Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya			
2.12.01.2.09.11	Sub Keg 6.3 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya		- Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	400.000.000,00	Sub Keg 6.3 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya		- Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	400.000.000,00	
			- Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya					- Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya			
2.12.02	Program 2 PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK	Kepahiang			390.000.000,00	Program 2 PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK	Kepahiang			390.000.000,00	
2.12.02.20.1	Keg 1. Pelayanan Pendaftaran Penduduk					Keg 1. Pelayanan Pendaftaran Penduduk					
2.12.02.20.1.01	Sub Keg 1.1 Pendataan Penduduk Non Permanen dan Rentan Administrasi Kependudukan		- Jumlah Dokumen Hasil Pendataan Penduduk Non Permanen dan Rentan Administrasi Kependudukan	Dokumen	105.000.000,00	Sub Keg 1.1 Pendataan Penduduk Non Permanen dan Rentan Administrasi Kependudukan		- Jumlah Dokumen Hasil Pendataan Penduduk Non Permanen dan Rentan Administrasi Kependudukan	Dokumen	105.000.000,00	
			- Tersedianya Pendataan Penduduk Non Permanen dan Rentan Administrasi Kependudukan					- Tersedianya Pendataan Penduduk Non Permanen dan Rentan Administrasi Kependudukan			
2.12.02.20.1.05	Sub Keg 1.2 Pencatatan Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen		- Jumlah Dokumen Hasil Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen	Dokumen	85.000.000,00	Sub Keg 1.2 Pencatatan Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas		- Jumlah Dokumen Hasil Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas	Dokumen	85.000.000,00	

	Atas Pendaftaran Penduduk		Atas Pendaftaran Penduduk			Pendaftaran Penduduk		Pendaftaran Penduduk			
			- Terlaksananya Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pendaftaran Penduduk					- Terlaksananya Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pendaftaran Penduduk			
2.12.02.20.2	Sub Keg. 2 Penataan Pendaftaran Penduduk					Keg. 2 Penataan Pendaftaran Penduduk					
2.12.02.20.2.02	Keg 2.1 Pengadaan Dokumen Kependudukan selain Blangko KTP-EI, Formulir, dan Buku Terkait Pendaftaran Penduduk Sesuai dengan Kebutuhan		- Jumlah Dokumen Kependudukan selain Blangko KTP-EI, Formulir, dan Buku Terkait Pendaftaran Penduduk Sesuai dengan Kebutuhan yang Tersedia	Dokumen	150.000.000,00	Sub Keg 2.1 Pengadaan Dokumen Kependudukan selain Blangko KTP-EI, Formulir, dan Buku Terkait Pendaftaran Penduduk Sesuai dengan Kebutuhan		- Jumlah Dokumen Kependudukan selain Blangko KTP-EI, Formulir, dan Buku Terkait Pendaftaran Penduduk Sesuai dengan Kebutuhan yang Tersedia	Dokumen	150.000.000,00	
			- Tersedianya Dokumen Kependudukan selain Blangko KTP-EI, Formulir, dan Buku Terkait Pendaftaran Penduduk Sesuai dengan Kebutuhan					- Tersedianya Dokumen Kependudukan selain Blangko KTP-EI, Formulir, dan Buku Terkait Pendaftaran Penduduk Sesuai dengan Kebutuhan			
2.12.02.20.4	Sub Keg 3 Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk					Sub Keg 2.2 Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk					
2.12.02.20.4.01	Keg 3.1 Bimbingan Teknis Terkait Pendaftaran Penduduk		- Jumlah Laporan bimbingan Teknis Terkait Pendaftaran Penduduk	Laporan	50.000.000,00	Keg. 1 Bimbingan Teknis Terkait Pendaftaran Penduduk		- Jumlah Laporan bimbingan Teknis Terkait Pendaftaran Penduduk	Laporan	50.000.000,00	
			- Terlaksananya Bimbingan Teknis Terkait Pendaftaran Penduduk					- Terlaksananya Bimbingan Teknis Terkait Pendaftaran Penduduk			
2.12.03	Prog 3 PROGRAM PENCATATAN SIPIL	Kepahiang			382.000.000,00	Prog 3 PROGRAM PENCATATAN SIPIL	Kepahiang			382.000.000,00	
2.12.03.20.1	Sub Keg. 1 Pelayanan Pencatatan Sipil					Sub Keg. 1 Pelayanan Pencatatan Sipil					
2.12.03.20.1.01	Keg 1.1 Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pelaporan Peristiwa Penting		- Jumlah Dokumen Hasil Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pelaporan Peristiwa Penting	Dokumen	95.000.000,00	Keg 1.1 Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pelaporan Peristiwa Penting		- Jumlah Dokumen Hasil Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pelaporan Peristiwa Penting	Dokumen	95.000.000,00	
			- Terlaksananya Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pelaporan Peristiwa Penting					- Terlaksananya Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pelaporan Peristiwa Penting			
2.12.03.20.1.05	Keg 1.2 Pengadaan Dokumen Kependudukan selain		- Jumlah Dokumen Kependudukan selain Blangko KTP-EI, Formulir, dan Buku	Dokumen	87.000.000,00	Keg 1.2 Pengadaan Dokumen Kependudukan selain Blangko KTP-EI, Formulir, dan Buku		- Jumlah Dokumen Kependudukan selain Blangko KTP-EI, Formulir, dan Buku Terkait Pencatatan Sipil	Dokumen	87.000.000,00	

	Blangko KTP-EI, Formulir, dan Buku Terkait Pencatatan Sipil Sesuai dengan Kebutuhan		Terkait Pencatatan Sipil Sesuai dengan Kebutuhan yang Tersedia			Terkait Pencatatan Sipil Sesuai dengan Kebutuhan		Sesuai dengan Kebutuhan yang Tersedia			
			- Tersedianya Dokumen Kependudukan selain Blangko KTP-EI, Formulir, dan Buku Terkait Pencatatan Sipil Sesuai dengan Kebutuhan					- Tersedianya Dokumen Kependudukan selain Blangko KTP-EI, Formulir, dan Buku Terkait Pencatatan Sipil Sesuai dengan Kebutuhan			
2.12.03.20.2	Sub Keg 2 Penyelenggaraan Pencatatan Sipil					Sub Keg 2 Penyelenggaraan Pencatatan Sipil					
2.12.03.20.2.02	Keg 2.1 Koordinasi dengan Kantor Kementerian yang Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di Bidang Agama Kabupaten/Kota dan Pengadilan Agama yang Berkaitan dengan Pencatatan Nikah, Talak, Cerai, dan Rujuk bagi Penduduk yang Beragama Islam		- Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dengan Kantor Kementerian yang Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di Bidang Agama Kabupaten/Kota dan Pengadilan Agama yang Berkaitan dengan Pencatatan Nikah, Talak, Cerai, dan Rujuk bagi Penduduk yang Beragama Islam	Laporan	50.000.000,00	Keg 2.1 Koordinasi dengan Kantor Kementerian yang Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di Bidang Agama Kabupaten/Kota dan Pengadilan Agama yang Berkaitan dengan Pencatatan Nikah, Talak, Cerai, dan Rujuk bagi Penduduk yang Beragama Islam		- Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dengan Kantor Kementerian yang Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di Bidang Agama Kabupaten/Kota dan Pengadilan Agama yang Berkaitan dengan Pencatatan Nikah, Talak, Cerai, dan Rujuk bagi Penduduk yang Beragama Islam	Laporan	50.000.000,00	
			- Terlaksananya Koordinasi dengan Kantor Kementerian yang Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di Bidang Agama Kabupaten/Kota dan Pengadilan Agama yang Berkaitan dengan Pencatatan Nikah, Talak, Cerai, dan Rujuk bagi Penduduk yang Beragama Islam					- Terlaksananya Koordinasi dengan Kantor Kementerian yang Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di Bidang Agama Kabupaten/Kota dan Pengadilan Agama yang Berkaitan dengan Pencatatan Nikah, Talak, Cerai, dan Rujuk bagi Penduduk yang Beragama Islam			
2.12.03.20.2.04	Keg 2.2 Pelayanan Secara Aktif Pendaftaran Peristiwa Kependudukan dan Pencatatan Peristiwa Penting Terkait Pencatatan Sipil		- Jumlah Laporan Hasil Pelayanan Secara Aktif Pendaftaran Peristiwa Kependudukan dan Pencatatan Peristiwa Penting Terkait Pencatatan Sipil	Laporan	100.000.000,00	Keg 2.2 Pelayanan Secara Aktif Pendaftaran Peristiwa Kependudukan dan Pencatatan Peristiwa Penting Terkait Pencatatan Sipil		- Jumlah Laporan Hasil Pelayanan Secara Aktif Pendaftaran Peristiwa Kependudukan dan Pencatatan Peristiwa Penting Terkait Pencatatan Sipil	Laporan	100.000.000,00	
			- Terlaksananya Pelayanan Secara Aktif Pendaftaran Peristiwa Kependudukan dan Pencatatan Peristiwa Penting Terkait Pencatatan Sipil					- Terlaksananya Pelayanan Secara Aktif Pendaftaran Peristiwa Kependudukan dan Pencatatan Peristiwa Penting Terkait Pencatatan Sipil			
2.12.03.20.3	Sub Keg 3 Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pencatatan Sipil					Sub Keg 3 Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pencatatan Sipil					

2.12.03.20.3.04	Keg 3.1 Bimbingan Teknis Terkait Pencatatan Sipil		- Jumlah Laporan Hasil Bimbingan Teknis Terkait Pencatatan Sipil	Laporan	50.000.000,00	Keg 3.1 Bimbingan Teknis Terkait Pencatatan Sipil		- Jumlah Laporan Hasil Bimbingan Teknis Terkait Pencatatan Sipil	Laporan	50.000.000,00	
			- Terlaksananya Bimbingan Teknis Terkait Pencatatan Sipil					- Terlaksananya Bimbingan Teknis Terkait Pencatatan Sipil			
2.12.04	Prog 4 PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN	Kepahiang			135.000.000,00	Prog 4 PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN	Kepahiang			135.000.000,00	
2.12.04.2.03	Sub Keg 1 Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan					Sub Keg 1 Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan					
2.12.04.2.03.06	Keg 1.1 Kerja Sama dengan Organisasi Kemasyarakatan dan Perguruan Tinggi		- Jumlah Dokumen Kerja Sama dengan Organisasi Kemasyarakatan dan Perguruan Tinggi	Dokumen	85.000.000,00	Keg 1.1 Kerja Sama dengan Organisasi Kemasyarakatan dan Perguruan Tinggi		- Jumlah Dokumen Kerja Sama dengan Organisasi Kemasyarakatan dan Perguruan Tinggi	Dokumen	85.000.000,00	
			- Terlaksananya Kerja Sama dengan Organisasi Kemasyarakatan dan Perguruan Tinggi					- Terlaksananya Kerja Sama dengan Organisasi Kemasyarakatan dan Perguruan Tinggi			
2.12.04.2.04	Sub Keg 2 Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan					Sub Keg 2 Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan					
2.12.04.2.04.03	Keg 2.1 Bimbingan Teknis Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pendayagunaan Data Kependudukan		- Jumlah Laporan Hasil Bimbingan Teknis Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pendayagunaan Data Kependudukan	Laporan	50.000.000,00	Keg 2.1 Bimbingan Teknis Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pendayagunaan Data Kependudukan		- Jumlah Laporan Hasil Bimbingan Teknis Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pendayagunaan Data Kependudukan	Laporan	50.000.000,00	
			- Terlaksananya Bimbingan Teknis Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pendayagunaan Data Kependudukan					- Terlaksananya Bimbingan Teknis Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pendayagunaan Data Kependudukan			
2.12.05	Prog 5 PROGRAM PENGELOLAAN PROFIL KEPENDUDUKAN	Kepahiang			110.000.000,00	Prog 5 PROGRAM PENGELOLAAN PROFIL KEPENDUDUKAN	Kepahiang			110.000.000,00	
2.12.05.2.01	Sub Keg 1 Penyusunan Profil Kependudukan					Sub Keg 1 Penyusunan Profil Kependudukan					
2.12.05.2.01.01	Keg 1.2 Penyediaan		- Jumlah Data Kependudukan	Dokumen	45.000.000,00	Keg 1.2 Penyediaan Data		- Jumlah Data Kependudukan	Dokumen	45.000.000,00	

	Data Kependudukan Kabupaten/Kota		Kabupaten/Kota			Kependudukan Kabupaten/Kota		Kabupaten/Kota			
			- Tersedianya Data Kependudukan Kabupaten/Kota					- Tersedianya Data Kependudukan Kabupaten/Kota			
2.12.05.2.01.02	Keg 1.3 Tersedianya Data Kependudukan Kabupaten/Kota		- Jumlah Dokumen Profil Data Perkembangan dan Proyeksi Kependudukan serta Kebutuhan yang Lain	Dokumen	65.000.000,00	Keg 1.3 Tersedianya Data Kependudukan Kabupaten/Kota		- Jumlah Dokumen Profil Data Perkembangan dan Proyeksi Kependudukan serta Kebutuhan yang Lain	Dokumen	65.000.000,00	
			- Tersusunnya Profil Data Perkembangan dan Proyeksi Kependudukan serta Kebutuhan yang Lain					- Tersusunnya Profil Data Perkembangan dan Proyeksi Kependudukan serta Kebutuhan yang Lain			

BAB III

TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional

Indonesia merupakan negara urutan keempat di dunia dengan besaran penduduk setelah China, India dan USA, sehingga penyelenggaraan administrasi kependudukan secara tertib, teratur, berkesinambungan dan modern menuju tertib database, tertib NIK, tertib dokumen kependudukan merupakan keharusan yang pelaksanaannya tidak bisa ditawar-tawar lagi. Dengan berpedoman kepada undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang administrasi kependudukan sebagaimana telah diubah dengan undang-undang nomor 24 tahun 2013 beserta berbagai aturan di bawahnya maka penyelenggaraan administrasi kependudukan pada tahun 2020 merupakan kegiatan yang berkesinambungan dari kegiatan sebelumnya.

Kebijakan Nasional yang didukung DPR telah memprogramkan 5 (Lima) program strategis nasional yaitu :

1. Pemutakhiran data kependudukan;
2. Penerbitan Nomor Induk Kependudukan (NIK)
3. Penerapan KTP elektronik
4. Bidang pencatatan sipil “ Semua anak Indonesia tercatat kelahirannya”.
5. Penerbitan Kartu Identitas Anak (KIA)

3.2 Tujuan dan Sasaran Renja PD

Tujuan dan saran pembangunan dibidang kependudukan dan Pencatatan sipil yang selaras dengan Program Strategis Nasional, RPJP Daerah Kabupaten Kepahiang 2006-2025, RPJM Daerah Kabupaten Kepahiang 2016-2021 dan Renstra PD Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kepahiang 2016-2021, sebagai berikut :

3.2.1 Tujuan

1. Mewujudkan kepuasan masyarakat atas pelayanan pendaftaran penduduk dan Pencatatan sipil ;
2. Mewujudkan akurasi, validitas serta konsistensi data kependudukan terhadap data dokumen autentik lain ;
3. Mewujudkan efisiensi dan efektifitas koordinasi, komunikasi dan transformasi data kependudukan berbasis SIAK- ON LINE

3.2.2 Sasaran

1. Peningkatan kecepatan, ketepatan dan kenyamanan pelayanan pendaftaran penduduk dan Pencatatan sipil ;
2. Peningkatan kualitas Pencatatan biodata penduduk pada database kependudukan berdasarkan sumber data dokumen autentik lain ;
3. Peningkatan dan pengembangan sistem aplikasi, dan pembangunan jaringan komunikasi data antar lembaga (E-Government)

BAB IV
RENCANA KERJA DAN PENDANAAN
TAHUN ANGGARAN : 2023

Tabel 4.1
Rencana Kerja dan Pendanaan Program dan Kegiatan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kepahiang Tahun 2023
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kepahiang

Kode	Hasil Analisa Kebutuhan					Catatan Penting
	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan / Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Satuan	Kebutuhan dana	
2.12	Urusan Pemerintah Bidang Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil				3.296.986.203,00	
2.12.01	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil				3.296.986.203,00	
2.12.01	Prog 1 Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Kepahiang			2.324.148.402,75	
2.12.01.2.01	Keg1.Perencanaan, penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah					
2.12.01.2.01.06	Sub Keg 1.1 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD		- Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Laporan	212.430.000,00	
			- Tersedianya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD			
2.12.01.2.05	Keg 2. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah					
2.12.01.2.05.09	Sub Keg 2.1 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi		- Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Orang	50.000.000,00	
			- Terlaksananya Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi			
2.12.01.2.06	Keg 3. Administrasi Umum Perangkat Daerah					
2.12.01.2.06.01	Sub Keg 3.1 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor		- Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket	3.500.000,00	
			- Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor			
2.12.01.2.06..03	Sub Keg 3.3 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga		- Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Paket	5.000.000,00	
			- Tersedianya Peralatan Rumah Tangga			
2.12.01.2.06..04	Sub Keg 3.4 Penyediaan Bahan Logistik Kantor		Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Paket	156.198.100,00	
			- Tersedianya Bahan Logistik Kantor			

2.12.01.2.06.05	Sub Keg 3.5 Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan		- Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	27.050.600,00	
			- Tersedianya Barang Cetak dan Penggandaan			
2.12.01.2.06.06	Sub Keg 3.6 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan		- Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan	Dokumen	11.482.500,00	
			- Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan			
2.12.01.2.06.07	Sub Keg 3.7 Penyediaan Bahan/Material		- Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	Paket	14.959.600,00	
			- Tersedianya Bahan/Material			
2.12.01.2.06.09	Sub Keg 3.8 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		- Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	142.582.000,00	
			- Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD			
2.12.01.2.08	Keg 4. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					
2.12.01.2.08.01	Sub Keg 4.1 Penyediaan Jasa Surat Menyurat		- Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Laporan	4.080.000,00	
			- Terlaksananya Penyediaan Jasa Surat Menyurat			
2.12.01.2.08.02	Sub. 4.2 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		- Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	38.400.000,00	
			- Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik			
2.12.01.2.07	Keg 5 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah					
2.12.01.2.07.06	Sub Keg 5.2 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya		- Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Unit	35.000.000,00	
			- Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya			
2.12.01.2.09	Keg 6. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					
2.12.01.2.09.01	Sub Keg 6.1 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan		- Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Unit	87.080.000,00	
			- Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan			
2.12.01.2.09.06	Sub Keg 6.2 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya		- Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Unit	25.500.000,00	
			- Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya			
2.12.01.2.09.11	Sub Keg 6.3 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya		- Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	75.220.000,00	
			- Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya			
2.12.04	Prog 4 PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN	Kepahiang			84.390.000,00	
2.12.04.2.03	Sub Keg 1 Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan					
2.12.04.2.03.06	Keg 1.1 Kerja Sama dengan Organisasi Kemasyarakatan dan Perguruan Tinggi		- Jumlah Dokumen Kerja Sama dengan Organisasi Kemasyarakatan dan Perguruan Tinggi	Dokumen	84.930.000,00	

			- Terlaksananya Kerja Sama dengan Organisasi Kemasyarakatan dan Perguruan Tinggi			
			- Tersusunnya Profil Data Perkembangan dan Proyeksi Kependudukan serta Kebutuhan yang Lain			

TABEL 4.2
Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kepahiang Tahun 2022 dan Prakiraaan Maju Tahun 2023
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kepahiang

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan / Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2022				Perkiraan Maju Rencana Tahun 2023		
			Satuan	Lokasi	Kebutuhan Dana/Pagu indikatif (Rp)	Sumber Dana	Catatan Penting	Satuan	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (RP)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Urusan Pemerintah Bidang Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil				3.444.315.451,00				3.444.315.451,00
	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil				3.444.315.451,00				3.444.315.451,00
2.12.01	Prog 1 Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota			Kepahiang	2.427.315.451,00	Dana Alokasi Umum (DAU)			2.427.315.451,00
2.12.01.2.01	Keg1.Perencanaan, penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah								
2.12.01.2.01.06	Sub Keg 1.1 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	- Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Laporan		212.430.000,00			Laporan	212.430.000,00
		- Tersedianya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD							
2.12.01.2.05	Keg 2. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah								
2.12.01.2.05.09	Sub Keg 2.1 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	- Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Orang		50.000.000,00			Orang	50.000.000,00
		- Terlaksananya Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi							
2.12.01.2.05.11	Sub Keg. 2.2 Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	- Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Orang		85.000.000,00			Orang	85.000.000,00
		- Terlaksananya Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan							
2.12.01.2.06	Keg 3. Administrasi Umum Perangkat Daerah								
2.12.01.2.06.01	Sub Keg 3.1 Penyediaan	- Jumlah Paket Komponen	Paket		3.500.000,00			Paket	3.500.000,00

	Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan						
		- Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor						
2.12.01.2.06.02	Sub Keg 3.2 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	- Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	85.000.000,00			Paket	85.000.000,00
		- Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor						
2.12.01.2.06..03	Sub Keg 3.3 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	- Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Paket	5.000.000,00			Paket	5.000.000,00
		- Tersedianya Peralatan Rumah Tangga						
2.12.01.2.06..04	Sub Keg 3.4 Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Paket	394.200.000,00			Paket	394.200.000,00
		- Tersedianya Bahan Logistik Kantor						
2.12.01.2.06.05	Sub Keg 3.5 Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	- Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	24.000.000,00			Paket	24.000.000,00
		- Tersedianya Barang Cetak dan Penggandaan						
2.12.01.2.06.06	Sub Keg 3.6 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	- Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan	Dokumen	25.000.000,00			Dokumen	25.000.000,00
		- Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan						
2.12.01.2.06.07	Sub Keg 3.7 Penyediaan Bahan/Material	- Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	Paket	15.000.000,00			Paket	15.000.000,00
		- Tersedianya Bahan/Material						
2.12.01.2.06.09	Sub Keg 3.8 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	- Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	138.601.051			Laporan	138.601.051
		- Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD						
2.12.01.2.08	Keg 4. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah							
2.12.01.2.08.01	Sub Keg 4.1 Penyediaan Jasa Surat Menyurat	- Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Laporan	3.384.400,00			Laporan	3.384.400,00
		- Terlaksananya Penyediaan Jasa Surat Menyurat						
2.12.01.2.08.02	Sub. 4.2 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	- Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	50.000.000,00			Laporan	50.000.000,00
		- Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik						

2.12.01.2.07	Keg 5 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah							
2.12.01.2.07.05	Sub Keg 5.1 Pengadaan Mebel	- Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Unit		98.000.000,00		Unit	98.000.000,00
		- Tersedianya Mebel						
2.12.01.2.07.06	Sub Keg 5.2 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	- Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Unit		350.000.000,00		Unit	350.000.000,00
		- Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya						
2.12.01.2.07..09	Sub Keg 5.3 Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	- Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Unit		350.000.000,00		Unit	350.000.000,00
		- Tersedianya Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya						
2.12.01.2.09	Keg 6. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah							
2.12.01.2.09.01	Sub Keg 6.1 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	- Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Unit		112.700.000,00		Unit	112.700.000,00
		- Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan						
2.12.01.2.09.06	Sub Keg 6.2 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	- Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Unit		25.500.000,00		Unit	25.500.000,00
		- Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya						
2.12.01.2.09.11	Sub Keg 6.3 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	- Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit		400.000.000,00		Unit	400.000.000,00
		- Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya						
2.12.02	Program 2 PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK			Kepahiang	390.000.000,00	Dana Alokasi Umum (DAU)		390.000.000,00
2.12.02.20.1	Keg 1. Pelayanan Pendaftaran Penduduk							
2.12.02.20.1.01	Sub Keg 1.1 Pendataan Penduduk Non Permanen dan Rentan Administrasi Kependudukan	- Jumlah Dokumen Hasil Pendataan Penduduk Non Permanen dan Rentan Administrasi Kependudukan	Dokumen		105.000.000,00		Dokumen	105.000.000,00
		- Tersedianya Pendataan Penduduk Non Permanen dan Rentan Administrasi Kependudukan						
2.12.02.20.1..05	Sub Keg 1.2 Pencatatan	- Jumlah Dokumen Hasil Pencatatan,	Dokumen		85.000.000,00		Dokumen	85.000.000,00

	Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pendaftaran Penduduk	Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pendaftaran Penduduk							
		- Terlaksananya Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pendaftaran Penduduk							
2.12.02.20.2	Keg. 2 Penataan Pendaftaran Penduduk								
2.12.02.20.2.02	Sub Keg 2.1 Pengadaan Dokumen Kependudukan selain Blangko KTP-EI, Formulir, dan Buku Terkait Pendaftaran Penduduk Sesuai dengan Kebutuhan	- Jumlah Dokumen Kependudukan selain Blangko KTP-EI, Formulir, dan Buku Terkait Pendaftaran Penduduk Sesuai dengan Kebutuhan yang Tersedia	Dokumen		150.000.000,00			Dokumen	150.000.000,00
		- Tersedianya Dokumen Kependudukan selain Blangko KTP-EI, Formulir, dan Buku Terkait Pendaftaran Penduduk Sesuai dengan Kebutuhan							
2.12.02.20.4	Sub Keg 2.2 Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk								
2.12.02.20.4.01	Keg. 1 Bimbingan Teknis Terkait Pendaftaran Penduduk	- Jumlah Laporan bimbingan Teknis Terkait Pendaftaran Penduduk	Laporan		50.000.000,00			Laporan	50.000.000,00
		- Terlaksananya Bimbingan Teknis Terkait Pendaftaran Penduduk							
2.12.03	Prog 3 PROGRAM PENCATATAN SIPIL			Kepahiang	382.000.000,00	Dana Alokasi Umum (DAU)			382.000.000,00
2.12.03.20.1	Sub Keg. 1 Pelayanan Pencatatan Sipil								
2.12.03.20.1.01	Keg 1.1 Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pelaporan Peristiwa Penting	- Jumlah Dokumen Hasil Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pelaporan Peristiwa Penting	Dokumen		95.000.000,00			Dokumen	95.000.000,00
		- Terlaksananya Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pelaporan Peristiwa Penting							
2.12.03.20.1.05	Keg 1.2 Pengadaan Dokumen Kependudukan selain Blangko KTP-EI, Formulir, dan Buku Terkait Pencatatan Sipil Sesuai dengan Kebutuhan	- Jumlah Dokumen Kependudukan selain Blangko KTP-EI, Formulir, dan Buku Terkait Pencatatan Sipil Sesuai dengan Kebutuhan yang Tersedia	Dokumen		87.000.000,00			Dokumen	87.000.000,00
		- Tersedianya Dokumen Kependudukan selain Blangko KTP-EI, Formulir, dan Buku Terkait Pencatatan Sipil Sesuai dengan Kebutuhan							
2.12.03.20.2	Sub Keg 2 Penyelenggaraan Pencatatan Sipil								
2.12.03.20.2.02	Keg 2.1 Koordinasi dengan Kantor Kementerian yang	- Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dengan Kantor Kementerian yang Menyelenggarakan	Laporan		50.000.000,00			Laporan	50.000.000,00

	Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di Bidang Agama Kabupaten/Kota dan Pengadilan Agama yang Berkaitan dengan Pencatatan Nikah, Talak, Cerai, dan Rujuk bagi Penduduk yang Beragama Islam	Urusan Pemerintahan di Bidang Agama Kabupaten/Kota dan Pengadilan Agama yang Berkaitan dengan Pencatatan Nikah, Talak, Cerai, dan Rujuk bagi Penduduk yang Beragama Islam							
		- Terlaksananya Koordinasi dengan Kantor Kementerian yang Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di Bidang Agama Kabupaten/Kota dan Pengadilan Agama yang Berkaitan dengan Pencatatan Nikah, Talak, Cerai, dan Rujuk bagi Penduduk yang Beragama Islam							
2.12.03.20.2.04	Keg 2.2 Pelayanan Secara Aktif Pendaftaran Peristiwa Kependudukan dan Pencatatan Peristiwa Penting Terkait Pencatatan Sipil	- Jumlah Laporan Hasil Pelayanan Secara Aktif Pendaftaran Peristiwa Kependudukan dan Pencatatan Peristiwa Penting Terkait Pencatatan Sipil	Laporan		100.000.000,00			Laporan	100.000.000,00
		- Terlaksananya Pelayanan Secara Aktif Pendaftaran Peristiwa Kependudukan dan Pencatatan Peristiwa Penting Terkait Pencatatan Sipil							
2.12.03.20.3	Sub Keg 3 Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pencatatan Sipil								
2.12.03.20.3.04	Keg 3.1 Bimbingan Teknis Terkait Pencatatan Sipil	- Jumlah Laporan Hasil Bimbingan Teknis Terkait Pencatatan Sipil	Laporan		50.000.000,00			Laporan	50.000.000,00
		- Terlaksananya Bimbingan Teknis Terkait Pencatatan Sipil							
2.12.04	Prog 4 PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN			Kepahiang	135.000.000,00	Dana Alokasi Umum (DAU)			135.000.000,00
2.12.04.2.03	Sub Keg 1 Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan								
2.12.04.2.03.06	Keg 1.1 Kerja Sama dengan Organisasi Kemasyarakatan dan Perguruan Tinggi	- Jumlah Dokumen Kerja Sama dengan Organisasi Kemasyarakatan dan Perguruan Tinggi	Dokumen		85.000.000,00			Dokumen	85.000.000,00
		- Terlaksananya Kerja Sama dengan Organisasi Kemasyarakatan dan Perguruan Tinggi							
2.12.04.2.04	Sub Keg 2 Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan								

2.12.04.2.04.03	Keg 2.1 Bimbingan Teknis Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pendayagunaan Data Kependudukan	- Jumlah Laporan Hasil Bimbingan Teknis Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pendayagunaan Data Kependudukan	Laporan		50.000.000,00			Laporan	50.000.000,00
		- Terlaksananya Bimbingan Teknis Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pendayagunaan Data Kependudukan							
2.12.05	Prog 5 PROGRAM PENGELOLAAN PROFIL KEPENDUDUKAN				110.000.000,00	Dana Alokasi Umum (DAU	Kepahiang		110.000.000,00
2.12.05.2.01	Sub Keg 1 Penyusunan Profil Kependudukan								
2.12.05.2.01.01	Keg 1.2 Penyediaan Data Kependudukan Kabupaten/Kota	- Jumlah Data Kependudukan Kabupaten/Kota	Dokumen		45.000.000,00			Dokumen	45.000.000,00
		- Tersedianya Data Kependudukan Kabupaten/Kota							
2.12.05.2.01.02	Keg 1.3 Tersedianya Data Kependudukan Kabupaten/Kota	- Jumlah Dokumen Profil Data Perkembangan dan Proyeksi Kependudukan serta Kebutuhan yang Lain	Dokumen		65.000.000,00			Dokumen	65.000.000,00
		- Tersusunnya Profil Data Perkembangan dan Proyeksi Kependudukan serta Kebutuhan yang Lain							

BAB V

PENUTUP

5.1. Catatan Penting Dalam Penyusunan Renja

Penyusunan Rencana Kerja (Renja) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kepahiang Tahun 2023 ini dimaksudkan untuk dijadikan dokumen perencanaan yang disusun sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan pemerintah serta sebagai panduan dalam pelaksanaan kegiatan pembangunan di bidang administrasi kependudukan, dimana program adminduk merupakan rangkaian kegiatan penataan dan penertiban dalam penerbitan dokumen dan data kependudukan melalui Pendaftaran Penduduk, Akta Pencatatan Sipil, Pengelolaan Informasi Kependudukan dan hasilnya digunakan untuk peningkatan pelayanan publik serta kegiatan pembangunan sektor lainnya.

Mengingat strategisnya peran administrasi kependudukan dalam berbangsa dan bernegara terutama dari aspek kepastian status hukum warganya dan informasi data kependudukan sebagai data statistic dapat dijadikan bahan pertimbangan dalam perencanaan dan pengambilan keputusan di segala aspek kehidupan terutama aspek pendidikan , aspek ekonomi dan aspek keamanan. Untuk itu maka terhadap rencana kerja tahun ini perlu kajian dan penyempurnaan yang dilakukan secara berkesinambungan dan terus menerus untuk mengakomodasi dinamika yang senantiasa berkembang di masyarakat.

5.2. Kaidah-kaidah pelaksanaan

Guna memperoleh optimalisasi pencapaian hasil pada pelaksanaan program dan kegiatan yang dilaksanakan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kepahiang maka rencana kerja tahunan yang dibuat harus berorientasi pada norma aturan perundang-undangan yang berlaku serta menerapkan prinsip-prinsip efisiensi, efektifitas, transparansi dan akuntabilitas serta memiliki visi kedepan yang hasil akhirnya dapat diukur dengan jelas dan pasti .

Didalam penyusunan Rencana Kerja (Renja) diupayakan agar terjadi sinkronisasi dan sinergitas antar program dan kegiatan. Dimana Renja yang dibuat harus berpedoman pada dokumen-dokumen perencanaan yang ada di atasnya diantaranya (RPJMN, RPJMD Provinsi, RPJMD Kabupaten, dan Rencana Strategis Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kepahiang)

5.3. Rencana Tidak Lanjut.

Kapasitas Sumber Daya Manusia yang ada untuk melaksanakan tugas pelayanan prima perlu ditingkatkan terutama yang berkaitan dengan teknologi informatika melalui bimtek, pelatihan dan kegiatan lainnya yang menunjang peningkatan kinerja pelayanan publik.

Kapasitas Sumber Daya Manusia yang ada saat ini dari sisi kuantitas masih kurang. Hal ini berakibat tidak optimalnya pelayanan kepada masyarakat, sehingga perlu menambah pegawai supaya rasio pekerjaan dan jumlah pegawai berimbang. Sementara itu, untuk mengatasi kekurangan

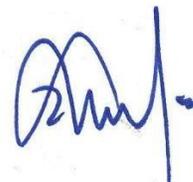
jumlah pegawai tersebut Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kepahiang telah merekrut tenaga harian lepas sebanyak 11 pegawai dengan harapan agar tenaga harian lepas tersebut nantinya dapat segera diangkat menjadi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) dan 1 orang tenaga ahli.

Dalam rangka memberikan pelayanan prima kepada masyarakat serta berdasar dinamika tuntutan masyarakat maka Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kepahiang melaksanakan kegiatan pelayanan keliling untuk lokasi yang jauh dari pelayanan seperti desa, kelurahan sekolah, pondok pesantren dan tempat lainnya. Untuk menunjang kegiatan tersebut, dibutuhkan kendaraan operasional roda 4 yang memadai.

Demikian Rencana Kerja (Renja) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tahun 2023 yang dapat kami buat dan semoga dapat menjadikan dokumen perencanaan yang bermanfaat sehingga kami dapat memberikan pelayanan yang prima kepada masyarakat dalam rangka mewujudkan tertib administrasi kependudukan yang berbasis SIAK on line di tahun 2023

Kepahiang , Februari 2023

KEPALA DINAS
KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
KABUPATEN KEPAHIANG



Ir. NYAYU ELIA HASANAH, M.Si

Pembina Utama Muda (IV/c)

NIP. 19690507 199402 2 002

